

ABSTRAKSI

Semakin berkembangnya suatu daerah menuntut suatu aktifitas yang serba cepat, dalam hal ini pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Angkutan umum bus cepat merupakan salah satu moda transportasi dalam kaitannya dengan pergerakan penumpang dari Semarang-Solo dan sebaliknya. kebutuhan dan kondisi masyarakat akan jasa transportasi yang serba cepat, aman, dan nyaman ini pun kemudian difasilitasi oleh empat perusahaan Oto bus, Karya Jaya, Rajawali, Apollo, dan Muncul. Penetapan tarif yang mengacu pada standar intansi terkait menjadi permasalahan bagi perusahaan jasa angkutan dalam memperoleh keuntungan sehingga diperlukan analisa tentang tarif dan penambahan frekuensi sehingga tarif yang didapat efisien.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data yang menunjang, baik data primer maupun sekunder. Data-data primer meliputi jumlah penumpang dan jumlah frekuensi perjalanan, sedangkan data-data sekunder yaitu tarif yang berlaku, jadwal operasi bus, jumlah armada bus, kapasitas bus, jarak dan waktu tempuh perjalanan, BOK, dan kondisi makro penduduk Semarang-Solo.

Dari hasil penelitian didapat biaya operasional kendaraan untuk PO. Karya Jaya dengan load factor terbesar yaitu 153,217 rupiah per seat-km, dan untuk PO. Rajawali sebesar 171,418 rupiah per seat-km dengan load factor terkecil. Dengan menghilangkan jam-jam keberangkatan yang kurang efektif maka didapat penurunan tarif sebesar Rp 415,47 untuk tujuan Semarang-Salatiga, Rp 377,70 tujuan Salatiga-Solo, dan Rp 793,17 untuk tujuan Semarang-Solo. Jumlah armada yang ada berdasarkan analisa telah mencukupi, dengan kata lain tidak perlu adanya penambahan frekuensi.

Untuk menampung aspirasi penumpang disini diadakan kuisisioner dengan jumlah responden 400 orang penumpang jurusan Semarang-Solo dan sebaliknya. Sebagian besar responden menyatakan tarif yang berlaku sekarang mahal dengan hasil kuisisioner menunjukkan 83 % penumpang arah Semarang-Solo menyatakan mahal sedangkan penumpang arah Solo-Semarang menyatakan mahal sebesar 103 %. Hal ini harus disikapi oleh pihak perusahaan oto bus, pemerintah dan pemakai jasa angkutan umum untuk mencari solusi tentang besarnya tarif supaya tidak menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak.